

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi di negara berkembang ditujukan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, serta menciptakan struktur perekonomian yang seimbang. Salah satu ukuran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Ukuran pendapatan nasional yang sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai total nilai atau harga pasar (*market prices*) dari seluruh barang dan jasa akhir (*final goods and services*) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun).

PDB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. Apabila PDB-nya menunjukkan adanya peningkatan, maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Menurut Simanjuntak (1998, 58) pembangunan ekonomi yang mengarah pada pengembangan industrialisasi dapat dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi pasar tenaga kerja.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Hal ini memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Pembangunan sektor industri dipandang mampu mendorong perekonomian Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Didukung oleh sumber daya manusia yang melimpah, maka sektor industri diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Namun pada kenyataannya penyerapan

tenaga kerja kurang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tinggi. Sektor industri seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja namun kenyataannya tidak demikian. Diperlukan perbaikan kebijakan pada sektor industri dalam mengimbangi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.

Penyerapan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di provinsi dalam kurun waktu selama lima tahun sangat bervariasi, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.1. halaman 4. Berdasarkan Tabel 1.1 halaman 4 diketahui bahwa penyerapan tenaga Kerja di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan kabupaten Malang. Sementara penyerapan tenaga kerja terendah berada di Kota Blitar dan Kota Batu.

Berdasarkan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar kompetitif, upah merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam implementasinya, campur tangan pemerintah diperlukan dengan menentukan besaran upah yang berlaku di pasar melalui kebijakan upah minimum. Ketentuan upah minimum ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang baru, UU No. 13/2003.

Kebijakan upah minimum sendiri sebenarnya pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1970an. Sampai dengan akhir 1980an kebijakan tersebut lebih banyak bersifat simbolik saja (SMERU, 2001).

Tabel 1.1
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Kab./Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	45,500	46,832	25,689	25,826	31,179
2	Kab. Ponorogo	46,165	36,663	43,330	36,558	29,497
3	Kab. Trenggalek	45,581	46,274	52,332	57,332	56,265
4	Kab. Tulungagung	77,087	79,485	74,135	81,110	94,131
5	Kab. Blitar	40,770	52,350	74,292	77,179	57,347
6	Kab. Kediri	73,817	81,046	121,123	127,237	111,668
7	Kab. Malang	173,650	178,850	172,691	174,939	157,162
8	Kab. Lumajang	36,956	38,259	49,564	69,573	58,277
9	Kab. Jember	87,310	82,439	93,573	131,226	114,785
10	Kab. Banyuwangi	92,430	98,457	122,330	104,848	112,115
11	Kab. Bondowoso	25,018	32,529	20,755	40,538	45,597
12	Kab. Situbondo	30,535	36,500	33,738	39,289	35,052
13	Kab. Probolinggo	48,341	35,359	44,212	53,477	58,281
14	Kab. Pasuruan	177,360	202,423	159,517	180,191	193,088
15	Kab. Sidoarjo	243,353	301,423	332,114	342,579	363,354
16	Kab. Mojokerto	132,807	134,728	157,194	156,726	149,714
17	Kab. Jombang	93,902	92,295	90,461	116,261	90,988
18	Kab. Nganjuk	38,657	39,274	73,971	70,159	62,522
19	Kab. Madiun	21,013	16,779	20,944	23,930	18,818
20	Kab. Magetan	61,117	65,034	21,103	24,009	32,088
21	Kab. Ngawi	31,125	34,105	17,818	18,085	17,738
22	Kab. Bojonegoro	25,228	32,142	54,795	44,232	38,179
23	Kab. Tuban	22,110	33,600	43,978	39,171	48,145
24	Kab. Lamongan	42,386	38,671	49,534	38,290	43,731
25	Kab. Gresik	160,087	173,919	172,556	184,718	184,161
26	Kab. Bangkalan	27,726	17,291	32,720	24,593	21,676
27	Kab. Sampang	24,759	20,521	40,157	48,672	53,100
28	Kab. Pamekasan	29,283	26,052	8,653	7,394	13,065
29	Kab. Sumenep	82,437	45,889	16,412	22,278	16,530
30	Kota Kediri	22,661	22,929	25,149	24,571	20,146
31	Kota Blitar	6,235	6,095	8,716	10,619	9,389
32	Kota Malang	64,225	67,198	82,302	82,463	83,605
33	Kota Probolinggo	14,159	10,853	15,769	18,935	21,624
34	Kota Pasuruan	21,212	21,279	23,778	22,134	23,592
35	Kota Mojokerto	14,916	13,765	14,906	17,212	17,052
36	Kota Madiun	6,129	8,586	7,684	6,463	7,185
37	Kota Surabaya	193,279	205,246	260,021	283,879	277,149
38	Kota Batu	6,360	7,423	7,457	8,243	6,509
	TOTAL	2,385,686	2,482,563	2,665,473	2,834,939	2,774,504

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur berbagai tahun

Namun, sebagai akibat terjadinya berbagai perubahan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia pada akhir 1980an, kini upah minimum telah menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari cepatnya laju peningkatan besarnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu manfaat dari adanya kebijakan upah minimum adalah dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat pendapatan. Berdasarkan konsep *neoclassical model of labor leisure choice* bahwa faktor yang mendorong seorang tenaga kerja menawarkan hingga berapa lama waktu ia bekerja di pasar tenaga kerja ditentukan oleh kombinasi antara tingkat konsumsi seorang tenaga kerja (C) dan waktu luang/*leisure* (L) yang diperoleh hingga mencapai tingkat kepuasan/*utility* tertentu (Borjas, 2000, 27).

Tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan upah minimum sebenarnya adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal-hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Namun, kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Konflik ketenagakerjaan antara lain disebabkan oleh upah yang diterima oleh pekerja dirasakan belum layak untuk menopang hidup dan selanjutnya kebebasan pekerja untuk menuntut haknya dijamin oleh peraturan berupa kebijakan upah minimum. Adanya serikat kerja yang kuat di sektor industri memberikan daya tawar dalam keputusan kebijakan upah minimum. Sebaliknya pengusaha menghadapi sejumlah pilihan untuk tidak segera merespon tuntutan pekerja diantaranya karena penawaran tenaga kerja (*supply of labour*) cukup besar.

Tabel 1.2
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 s/d 2013

NO.	Kab./Kota	Rupiah				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Surabaya	948.500	1.031.500	1.115.000	1.257.000	1.740.000
2.	Kab. Gresik	971.624	1.010.400	1.115.000	1.257.000	1.740.000
3.	Kab. Sidoarjo	955.000	1.005.000	1.007.000	1.252.000	1.720.000
4.	Kab. Pasuruan	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000
5.	Kab. Mojokerto	971.624	1.009.150	1.105.000	1.234.000	1.700.000
6.	Kab. Malang	954.500	1.000.000	1.077.600	1.132.254	1.343.700
7.	Kota Malang	945.373	1.006.263	1.079.887	1.130.500	1.340.300
8.	Kota Batu	879.000	989.000	1.050.000	1.100.215	1.268.000
9.	Kab. Jombang	752.500	790.000	866.500	978.200	1.200.000
10.	Kab. Tuban	798.000	870.000	935.000	970.000	1.198.600
11.	Kota Pasuruan	806.000	865.000	926.000	975.000	1.195.800
12.	Kab. Probolinggo	682.500	744.000	814.000	888.500	1.144.400
13.	Kab. Jember	770.000	830.000	875.000	920.000	1.128.400
14.	Kota Probolinggo	662.500	741.000	810.500	885.000	1.104.600
15.	Kota Mojokerto	760.000	805.000	835.000	875.000	1.103.200
16.	Kab. Banyuwangi	744.000	824.000	865.000	915.000	1.091.950
17.	Kab. Lamongan	760.000	875.000	900.000	950.000	1.089.950
18.	Kota Kediri	856.000	906.000	975.000	1.037.500	1.086.400
19.	Kab. Bojonegoro	740.000	825.000	870.000	930.000	1.075.700
20.	Kab. Kediri	825.000	871.000	934.500	999.000	1.059.600
21.	Kab. Nganjuk	625.000	650.000	710.000	785.000	1.048.000
22.	Kab. Sampang	650.000	690.000	725.000	800.000	1.040.000
23.	Kab. Lumajang	655.000	688.000	740.700	825.391	1.029.500
24.	Kab. Tulungagung	600.000	641.000	720.000	815.000	1.011.950
25.	Kab. Bondowoso	620.000	668.000	735.000	800.000	1.007.900
26.	Kab. Bangkalan	715.000	775.000	850.000	850.000	983.800
27.	Kab. Pamekasan	750.000	900.000	925.000	975.000	965.000
28.	Kab. Sumenep	690.000	730.000	785.000	825.000	960.200
29.	Kab. Situbondo	610.000	660.000	733.000	802.500	1.048.000
30.	Kota Madiun	620.000	685.000	745.000	812.500	953.000
31.	Kab. Madiun	645.000	685.000	720.000	775.000	946.850
32.	Kab. Ngawi	635.000	665.000	725.000	780.000	946.000
33.	Kab. Blitar	570.000	655.000	750.000	820.000	924.800
34.	Kota Blitar	572.500	663.000	737.000	815.000	924.000
35.	Kab. Ponorogo	600.000	641.000	705.000	745.000	903.900
36.	Kab. Trenggalek	600.000	635.000	710.000	760.000	900.000
37.	Kab. Pacitan	600.000	630.000	705.000	750.000	887.250
38.	Kab. Magetan	645.000	650.000	705.000	750.000	866.250

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur berbagai tahun

Pengusaha disamping itu harus mengeluarkan sejumlah biaya tidak langsung yang tidak berkaitan dengan proses produksi. Pemerintah sebagai mediator berusaha berada di tengah-tengah diantara pihak pekerja dan perusahaan. Melalui kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), upah buruh dicoba diselamatkan yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya, namun ini belum dapat menyelesaikan persoalan. Beberapa alasan dari pendapat yang tidak mendukung adanya kebijakan upah minimum adalah pertama upah minimum akan menurunkan penyerapan tenaga kerja khususnya remaja dan wanita. Kedua, upah minimum menyebabkan dampak turunnya tingkat upah pada sektor pekerja non formal. Ketiga upah minimum mendorong remaja untuk putus sekolah (Mapherson, Brue, and Mc.Connel, 2003, 409).

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, dalam penentuan upah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, besaran kenaikan upah di kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari berbagai tahun dapat dilihat pada Tabel 1.2 halaman 6. Berdasarkan Tabel 1.2 halaman 6 diketahui bahwa upah minimum di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata kenaikan terbesar berada di kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten Pasuruan dan kabupaten Mojokerto. Sementara upah minimum terendah berada di Kabupaten Pacitan dan Magetan.

Beberapa studi lain terkait dengan masalah upah minimum menunjukkan hasil yang berbeda pada periode yang berbeda misalnya yang dilakukan oleh

Islam dan Nazara (2000) yang melakukan pengamatan pada masa Orde Baru. Pada masa itu tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara upah dan pengangguran. Kenaikan upah yang dilakukan melalui kebijakan Upah Minimum pada masa Orde Baru tidak mengurangi kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa kenaikan upah tersebut masih *reasonable* dihadapan pengusaha. Studi Ghellab (1998). Data sebelum krisis menunjukkan hubungan kenaikan upah minimum terhadap pekerjaan kelompok usia muda memiliki arah yang negatif tetapi parameternya kecil dan secara statistik juga kurang signifikan. Kebijakan upah sebelum krisis dengan kata lain tidak berdampak pada pengurangan pekerjaan.

Sebaliknya pada saat krisis, studi lembaga penelitian SMERU (*Social Monitoring and Early Response Unit*, 2001) setelah adanya otonomi daerah, pemerintah kota cenderung populis. Kecenderungan kebijakan pemerintah dalam kenaikan upah minimum yang pesat berdampak terhadap hilangnya kesempatan kerja dan sekaligus pendapatan pekerja. Hal ini terjadi khususnya seperti pada pekerja usia muda, pekerja tidak tetap, dan pekerja wanita.

Para pendukung dari kebijakan upah minimum berpendapat bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Mereka juga berpendapat bahwa upah minimum juga dapat mencegah para pengusaha sewenang-wenang dalam mengeksploitasi pekerja yang mempunyai keterampilan rendah (*low skilled*), yang kebanyakan adalah wanita. Kebijakan upah minimum merupakan instrument yang penting dalam menghadapi pengaruh gender dari institusi baik pada sisi permintaan maupun pada sisi penawaran tenaga

kerja di pasar yang mendukung dan menghasilkan perbedaan gender dalam upah dan ketenagakerjaan.

Teori Keynes menyatakan bahwa kenaikan tingkat upah dapat mengakibatkan peningkatan permintaan uang baik dengan motif transaksi maupun motif spekulasi, maka suku bunga juga akan naik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dengan asumsi suplai uang tetap stabil (Mankiw, 2006, 86). Ketika terjadi kenaikan suku bunga maka suku bunga deposito dan kredit untuk pinjaman juga mengalami kenaikan sehingga nanti suku bunga inilah yang akan mempengaruhi naik turunnya investasi pada sektor riil. Kenaikan tingkat upah minimum tersebut juga berarti bahwa pendapatan dari pekerja juga mengalami peningkatan. Pendapatan yang meningkat, selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya daya beli atau konsumsi serta permintaan uang. Menurut teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi. Menurut teori model Fisher, kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaliknya menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat bunga nominal (Mankiw, 2006, 78). Selanjutnya tingkat bunga yang tinggi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap investasi, yaitu menyebabkan turunnya investasi. Dalam *The General Theory*, Keynes menganggap bahwa investasi salah satunya ditentukan suku bunga. Perusahaan-perusahaan akan menjalankan investasi jika investasi itu nampak menguntungkan, yaitu jika besarnya pengembalian (*returns*, keuntungan atau hasil) melampaui suku bunga atas dana yang dapat dipinjam untuk membiayai investasi itu (Partadiredja, 1994, 45). Hasanah dan Sunyoto

(2012, 83) mengemukakan bahwa bagaimana investasi yang ditanamkan akan memberi keuntungan di masa yang akan datang, maka selayaknya adalah biaya untuk membayar bunga harus lebih rendah daripada tingkat pengembaliannya atau pendapatan investasinya. Atau dengan kata lain tingkat pengembalian (*rate of return*) investasi harus lebih tinggi daripada pembayaran tingkat bunganya.

Fungsi investasi dengan pendapatan menunjukkan kalau investasi dapat dipengaruhi oleh pendapatan. Fungsi investasi terhadap pendapatan ada dua macam yaitu fungsi investasi autonomos dan fungsi pendapatan terpengaruh. Fungsi investasi autonomos menyatakan bahwa apabila pendapatan akan naik maka investasi yang terjadi adalah tetap atau dapat dikatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Berbeda dengan fungsi investasi terpengaruh, fungsi ini menyatakan bahwa apabila pendapatan akan naik maka investasi akan naik dan investasi turun apabila pendapatan turun (Soediyono, 1981, 87). Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Selama tahun 2009-2013 di provinsi Jawa Timur telah terealisasi dengan nilai sebesar Rp 68,48 Triliyun. Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi investasi (PMDN dan PMA) selama lima tahun tumbuh dengan jumlah

proyek dari 181 proyek menjadi 511 proyek. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup optimal dalam usaha menarik investor yang dapat memberdayakan potensi ekonomi di wilayahnya.

Tabel 1.3
Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 s/d 2013

No	Kab./Kota	Unit Usaha					(Rp. Triliun)				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Sidoarjo	36	125	74	80	123	2.4	8.6	9.8	9.7	14.67
2	Kota Surabaya	46	88	56	8	10	2.2	5.4	5.8	7.61	14.43
3	Kab. Gresik	26	32	32	84	81	1.5	3.2	5.3	7.4	11.31
4	Kab. Pasuruan	28	19	18	91	12	0.6	1.8	4.6	6.91	9.32
5	Kab. Mojokerto	22	25	67	3	86	0.45	1.8	3.8	6.41	5.78
6	Kab. Tuban	12	22	32	97	74	0.25	1.2	2.9	3.73	3.51
7	Kab. Probolinggo	1	17	18	7	51	0.2	1.2	2.8	3.16	3.27
8	Kab. Sampang	3	6	9	50	7	0.15	0.7	1.73	3.06	1.18
9	Kab. Lamongan	2	21	12	7	8	0.1	0.65	1.08	2.83	1.04
10	Kab. Bojonegoro	2	15	6	8	1	0.1	0.6	0.4	1.22	0.98
11	Kab. Kediri	1	11	18	17	6	0.05	0.6	0.4	0.85	0.65
12	Kab. Jember	1	9	16	12	12	0.05	0.2	0.34	0.55	0.64
13	Kab. Nganjuk	1	4	12	4	8	0.04	0.2	0.3	0.33	0.45
14	Kab. Pacitan	-	1	7	9	11	-	0.12	0.25	0.1	0.4
15	Kab. Ponorogo	-	1	11	-	5	-	0.05	0.2	-	0.35
16	Kab. Trenggalek	-	-	19	-	10	-	-	0.2	-	0.3
17	Kab. Tulungagung	-	-	6	-	6	-	-	0.2	-	0.2
18	Kab. Blitar	-	-	5	-	-	-	-	0.2	-	-
19	Kab. Malang	-	-	1	-	-	-	-	0.1	-	-
TOTAL		181	396	419	477	511	8.1	26.3	40	54	68.5

Sumber: BPS Jawa Timur berbagai tahun

Selama kurun waktu lima tahun 2009 sampai dengan 2013 hanya terdapat 19 daerah kabupaten/kota yang terdapat investasi dari investor. Daerah-daerah dengan investasi tertinggi masih tetap didominasi oleh daerah-daerah dengan industri-industri yang besar, kabupaten Sidoarjo berada di urutan pertama, kota Surabaya dan diikuti kabupaten Gresik. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama ini selalu berorientasi pada keberhasilan bidang ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor industri akan menyebabkan meningkatnya peranan sektor industri, karena pengembangan sektor industri yang

berbasis pertanian bagian yang cukup penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di Indonesia, yang terjadi adalah semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ini akan menyebabkan semakin besar pula tingkat pertumbuhan sektor industri yang ada di daerah tersebut.

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan Handoko, 2005, 67). Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja. Kemajuan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.4 halaman 13.

Hasil dari pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini mempunyai dampak yang besar yaitu terjadinya perubahan sektoral. Perubahan ini juga terjadi pada tenaga kerja, banyak tenaga kerja yang pindah dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Tabel 1.4.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

NO.	Kab./Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Surabaya	5,14	7,47	7,72	7,62	7,34
2.	Kab. Gresik	5,61	6,89	7,36	7,43	7,14
3.	Kab. Sidoarjo	4,53	5,92	7,04	7,13	7,04
4.	Kab. Pasuruan	5,03	6,23	7,21	7,23	6,97
5.	Kab. Mojokerto	5,01	6,87	7,14	7,21	6,9
6.	Kab. Malang	5,02	6,57	7,43	7,44	6,65
7.	Kota Malang	4,43	6,6	7,5	7,57	7,3
8.	Kota Batu	6,1	7,16	8,01	8,25	8,2
9.	Kab. Jombang	5,01	6,65	6,93	6,97	6,44
10.	Kab. Tuban	5,75	6,3	7,24	6,22	7,18
11.	Kota Pasuruan	5,01	5,99	7,02	6,46	6,54
12.	Kab. Probolinggo	5,01	6,41	6,58	6,55	6,58
13.	Kab. Jember	5,04	5,94	6,29	7,21	6,9
14.	Kota Probolinggo	5,01	6,41	6,58	6,89	6,81
15.	Kota Mojokerto	5,11	6,66	6,98	7,11	6,63
16.	Kab. Banyuwangi	5,36	6,26	7,22	7,21	6,91
17.	Kab. Lamongan	5,8	6,86	7,08	7,13	6,9
18.	Kota Kediri	4,5	5,99	7,02	7,51	6,45
19.	Kab. Bojonegoro	6,07	10,97	9,24	5,68	5,3
20.	Kab. Kediri	4,4	6,07	7,21	6,98	6,52
21.	Kab. Nganjuk	5,29	6,32	6,4	6,68	6,73
22.	Kab. Sampang	4,12	5,4	6,29	6,12	5,74
23.	Kab. Lumajang	5,04	6,16	7,0	6,43	6,51
24.	Kab. Tulungagung	5,15	6,65	7,24	6,99	6,63
25.	Kab. Bondowoso	4,98	5,89	6,23	6,45	6,27
26.	Kab. Bangkalan	4,27	5,47	6,5	6,31	6,38
27.	Kab. Pamekasan	5,03	5,77	6,21	6,32	6,28
28.	Kab. Sumenep	4,1	5,51	6,24	6,33	6,44
29.	Kab. Situbondo	4,48	5,89	6,23	6,54	6,87
30.	Kota Madiun	5,92	6,97	7,18	7,79	8,07
31.	Kab. Madiun	5,01	5,96	6,71	6,43	6,37
32.	Kab. Ngawi	5,08	6,19	6,76	6,58	7,15
33.	Kab. Blitar	5,03	6,12	6,54	6,35	6,18
34.	Kota Blitar	5,52	6,66	6,57	6,78	6,57
35.	Kab. Ponorogo	5,01	5,89	6,25	6,52	5,67
36.	Kab. Trenggalek	5,0	6,16	6,55	6,62	6,21
37.	Kab. Pacitan	5,1	6,66	6,85	6,73	6,02
38.	Kab. Magetan	5,04	5,81	6,14	6,39	6,67

Sumber: BPS data diolah

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 daerah kabupaten/kota mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang beragam. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami daerah yang banyak terdapat industri-industri yang berkembang.

Kota Surabaya, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Pasuruan serta kabupaten Mojokerto memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi. Adanya pusat-pusat industri menjadi faktor utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, diantaranya: pusat industri *Surabaya Industrial Estate Rungkut* (SIER), *Pasuruan Industrial Estate Rembang* (PIER), *Kawasan Industri Gresik* (KIG), *Ngoro Industrial Park* (NIP), *Maspion Industrial Estate* (MIE), *Sidoarjo Industrial Estate Brebek* (SIEB). Daerah-daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah terdapat pada daerah-daerah yang produktifitasnya masih didominasi pada sektor pertanian. Daerah-daerah tersebut diantaranya: kabupaten Sampang, kabupaten Sumenep, kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa kebijakan upah minimum mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor industri serta pertumbuhan ekonomi, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga Kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

- 2) Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap investasi (PMDN dan PMA) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
- 3) Apakah terdapat pengaruh penyerapan tenaga Kerja dan investasi (PMDN dan PMA) secara bersama-sama dan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap investasi (PMDN dan PMA) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
- 3) Menguji dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dan investasi (PMDN dan PMA) secara bersama-sama dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a) Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan serta adanya implikasi teoritis terkait dengan teori ketenagakerjaan, khususnya mengenai kebijakan upah minimum dan

pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi di serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

b) Manfaat praktis

Menyumbangkan pemikiran kepada pembuat kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan persoalan ketenagakerjaan khususnya mengenai kebijakan penetapan upah minimum dan permasalahan investasi di Jawa Timur.

